
INKLUSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN DESA

Oleh :

Yanuar Yoga Prasetyawan dan Patut Suharso¹

Abstrak

Perpustakaan desa sepatutnya menjadi lembaga inklusi sosial, siapapun dapat masuk ke perpustakaan dan menikmati layanan perpustakaan secara gratis. Masyarakat merupakan pihak yang paling berkepentingan dengan keberadaan lembaga pelayanan informasi (perpustakaan). Kebutuhan masyarakat terhadap informasi dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas hidup sepatutnya menjadi landasan pokok sebuah perpustakaan berdiri. Sehingga segala proses pembangunan dan pengembangan perpustakaan sangat berkaitan dengan upaya masyarakat dalam mengembangkan diri serta meningkatkan mutu dan kualitas hidup.

Kata Kunci: inklusi sosial, perpustakaan desa, pemberdayaan masyarakat

PENDAHULUAN

Perpustakaan desa merupakan perpanjangan tangan layanan dari perpustakaan daerah (*public library*). Tumbuh dan kembangnya perpustakaan desa merupakan tanggung jawab perpustakaan daerah dan pemerintah daerah setempat, seperti halnya yang tercantum dalam UU No 43 Tahun 2007. Namun yang menjadi kendala adalah tidak semua wilayah terjangkau oleh perpustakaan daerah, sehingga beberapa perpustakaan desa yang dibangun bukan dari binaan perpustakaan daerah cenderung meredup seiring berjalannya

waktu dikarenakan kendala finansial maupun teknis.

Perpustakaan desa telah marak didirikan di berbagai tempat di Indonesia. Seperti halnya yang dilansir oleh Sumekar dalam Sutarno (2008) bahwa dari 70.305 jumlah desa di Indonesia hanya 4345 desa yang memiliki perpustakaan. Akan tetapi kebanyakan dari perpustakaan tersebut hanya merupakan tempat yang berisikan rak dan buku dengan ruangan yang terkunci dan belum berfungsi secara maksimal. Alasan klasiknya adalah meredupnya

penyelenggara Perpustakaan desa dan TBM tersebut dan atau minat baca masyarakat yang belum membudaya. Selain alasan tersebut pemahaman yang tepat dan benar oleh masyarakat akan pentingnya lembaga perpustakaan bagi mereka juga memiliki andil yang cukup besar terhadap belum berhasilnya usaha pengembangan perpustakaan desa (Blasius: 2006).

Perpustakaan desa sepatutnya menjadi lembaga inklusi sosial, siapapun dapat masuk ke perpustakaan dan menikmati layanan perpustakaan secara gratis. Namun yang terjadi adalah perpustakaan hanya dikunjungi oleh kalangan tertentu, beberapa anggota masyarakat yang lain tidak menyadari bahkan tidak tahu dengan apa yang ditawarkan perpustakaan kepada mereka. Kondisi ini diperparah dengan asumsi pustakawan yang beranggapan bahwa tidak datangnya masyarakat ke perpustakaan adalah pilihan pribadi masyarakat tersebut, perpustakaan hanya bertugas menawarkan layanan informasi kepada masyarakat.

Bagi kalangan eksklusif yaitu masyarakat yang tidak berkunjung ke perpustakaan setempat, mereka menganggap perpustakaan merupakan

tempat yang menakutkan untuk dikunjungi. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kelas sosial-ekonomi, pekerjaan, tingkat pendidikan, *gender*, dan lain sebagainya (Williment:2009, Gidley: 2010). Ironisnya adalah masyarakat eksklusif merasa bahwa perpustakaan tidak memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan informasi mereka, sehingga mereka jauh dari perpustakaan. Padahal fungsi perpustakaan untuk memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan informasi semua anggota masyarakat.

Masyarakat yang tinggal dan hidup di lingkungan sekitar perpustakaan desa tidak dapat dinafikan begitu saja dalam setiap proses pembangunan dan pengembangan perpustakaan. Karena merekalah yang pertama kali akan menerima dampak dan memberikan pengaruh terbesar terhadap proses tumbuh kembangnya perpustakaan tersebut. Kritik serupa juga dilontarkan oleh Blasius (2006) “ Biasanya dalam membangun perpustakaan selalu dikaitkan dengan berorientasi pada pemakai. Namun apakah mereka sungguh-sungguh ditanyai dalam proses pembangunan perpustakaan tersebut?

Bukankah proses pembangunan selama ini hanya berdasarkan asumsi saja atas keperluan pemakai??"

Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya lembaga pelayanan informasi dapat tercipta dengan baik melalui bentuk inklusifitas yaitu partisipasi langsung kelompok masyarakat dalam pembangunan perpustakaan desa (Williment:2009). Partisipasi masyarakat menjadi penting terkait dengan orientasi keberadaan perpustakaan dalam pelayanannya terhadap kebutuhan informasi masyarakat pengguna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perpustakaan Desa sebagai Lembaga Inklusif

Perpustakaan desa dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No 3 Tahun 2001 Tentang Perpustakaan Desa/ Kelurahan didefinisikan sebagai wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pendidikan nasional. Menurut Sutarno (2008) perpustakaan desa sebagai perpustakaan umum yang dibentuk dan diselenggarakan di desa, yang pada dasarnya dimiliki oleh masyarakat,

Masyarakat merupakan pihak yang paling berkepentingan dengan keberadaan lembaga pelayanan informasi (perpustakaan). Kebutuhan masyarakat terhadap informasi dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas hidup sepatutnya menjadi landasan pokok sebuah perpustakaan berdiri. Sehingga segala proses pembangunan dan pengembangan perpustakaan sangat berkaitan dengan upaya masyarakat dalam mengembangkan diri serta meningkatkan mutu dan kualitas hidup.

dibangun oleh masyarakat dan ditujukan untuk melayani masyarakat di masing-masing desa yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa terdapat hubungan kausalitas antara perpustakaan dan masyarakat. Dibangunnya sebuah perpustakaan karena adanya masyarakat yang membutuhkan informasi, dan keberadaan perpustakaan adalah untuk melayani masyarakat.

Menengok definisi yang diberikan tersebut, maka dalam pembangunan perpustakaan desa sudah seharusnya menjauhi pembangunan dengan pendekatan

teknis (*technical approach*). Pendekatan teknis akan berorientasi pada teknis pelayanan semata tanpa memperhatikan siapa yang akan dilayaninya kelak. Berbeda dengan upaya pembangunan perpustakaan yang berbasis dengan pendekatan sistem sosial (*system social approach*) atau pendekatan kemanusiaan (*humanistic approach*), pendekatan ini melihat perpustakaan merupakan bagian sub sistem sosial dalam sistem masyarakat, sehingga perpustakaan dirancang agar memiliki nilai kebergunaan yang tinggi dalam masyarakat (Blasius:2006). Melalui pendekatan sistem sosial atau pendekatan kemanusiaan diharapkan perpustakaan desa mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk menemukan solusi dalam kehidupan untuk meningkatkan mutu dan kualitas hidupnya.

Sebagai model pembangunan perpustakaan yang dilakukan melalui pendekatan sistem sosial, Perpustakaan desa Taruna Bhakti Banjar waru berdiri atas inisiatif masyarakat Dukuh Banjarwaru. Pionir dari berdirinya perpustakaan tersebut bermula dari koleksi buku salah satu warga dukuh yang berprofesi sebagai petani dan lulusan Madrasah Tsanawiyah (setingkat

sekolah menengah pertama) bernama Ropik.

Koleksi buku tersebut di dapatkannya dari membeli dari took buku dan meminta dari setiap acara atau kunjungannya ke sebuah instansi. Dari usahanya tersebut menyebabkan seorang petani sepertinya memiliki koleksi buku yang cukup banyak. (Amrullah: 2011)

Koleksibuku yang dikumpulkanolehRopiktersebut, banyak yang dipinjam dan dimanfaatkan oleh warga lain di dukuhnya. Tidak jarang buku yang dipinjan kembali dengan kondisi yang sudah rusak bahkan tak kunjung kembali. Namun fenomena tersebut ditangkap oleh Ropik bukan sebagai sesuatu yang merugikan dirinya. Ropik beranggapan bahwa minat baca di dukuh tempatnya tinggal cukup tinggi. Akhirnya anggapan tersebut menumbuhkan keinginan seorang petani dan lulusan Madrasah Tsanawiyah tersebut untuk mendirikan perpustakaan dengan pengelolaan yang terorganisir dengan baik.(Amrullah: 2011)

Ropik sangat yakin jika hanya dia seorang diri yang memiliki keinginan untuk membangun sebuah perpustakaan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat

umum, dia tidak akan sanggup melaksakannya, karena banyak hal yang harus dikerjakannya kaitannya dengan pembangunan sebuah perpustakaan desa. Keinginan Ropik untuk membangun sebuah perpustakaan desa ditularkannya kepada Organisasi Karang Taruna setempat. Organisasi yang beranggotakan para pemuda Dukuh Banjar waru tersebut mengamini tekad dan keinginan Ropik untuk membangun sebuah perpustakaan desa. (Amrullah: 2011)

Para pemuda karang taruna turut antusias dalam usaha pembangunan perpustakaan desa. Untuk mendapatkan dukungan dari seluruh warga Dukuh Banjar waru, para pemuda karang taruna berserta Ropik menyampaikan keinginan mereka untuk membangun sebuah perpustakaan desa kepada aparat desa setempat seperti ketua RT dan RW, sesepuhdesa, dan kepala desa. Sambutan yang baik dan positif pun datang dari para aparat desa, mereka turut mensukseskan berdirinya sebuah perpustakaan desa yang memiliki pengelolaan dan pengorganisasian yang jelas melalui dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Wonosari Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Nomor: 421.2/99/2007 tentang

Pembentukan Perpustakaan Masyarakat Taruna Bhakti Banjarwaru. Dalam SK tersebut dijelaskan pula pengelola perpustakaan desa yang terdiri dari kelompok karang taruna, aparat desa, petani, dan guru. (Amrullah: 2011)

Dibangunnya sebuah perpustakaan melalui pendekatan sistem sosial atau kemanusiaan, memiliki dampak hilangnya kekaburan fungsi perpustakaan sebagai lembaga inklusif. Fenomena berdirinya Perpustakaan desa Taruna Bhakti Banjar waru merupakan cerminan sebuah perpustakaan yang inklusif. Perpustakaan tersebut berdiri dan dibangun karena adanya peran serta masyarakat setempat. Masyarakat setempat merasa membutuhkan sebuah wadah bagi mereka untuk memuaskan dahaga keingintahuan mereka terhadap pengetahuan baru. Akhirnya setiap anggota masyarakat akan mendapatkan pelayanan serta mendapatkan manfaat yang sama dari perpustakaan desa tersebut. Karena perpustakaan desa tersebut dibangun dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat.

Layanan Perpustakaan Berbasis Masyarakat

Penelitian yang pernah dilakukan Willment (2009) terhadap perpustakaan umum di Kanada mengenai bentuk eksklusi sosial yang terjadi di dalam pelayanan perpustakaan tersebut. Dari hasil interview dengan masyarakat sekitar perpustakaan tersebut diketahui masyarakat masih menganggap perpustakaan merupakan tempat yang mencekam untuk dikunjungi. Pustakawan lebih terkesan sebagai pengajar dari pada rekan untuk memenuhi kebutuhan informasi. Masyarakat masih belum merasakan perpustakaan dapat memainkan perannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal tersebut yang menjadikan masyarakat masih menjaga jarak dengan perpustakaan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terdapat kelemahan pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan. Proses layanan perpustakaan yang diberikan mencakup penilaian masyarakat, identifikasi kebutuhan, perencanaan layanan, penyempaian layanan, dan evaluasi yang dilakukan hanya menggunakan sudut pandang perpustakaan. Masyarakat yang dilayani

tidak menjadi dasar pelayanan yang akan diberikan.

Bermodalkan persepsi masyarakat terhadap perpustakaan tersebut di atas, perpustakaan berusaha mengembangkan model pelayanan perpustakaan yang baru. Perpustakaan menjalin komunikasi dan membangun hubungan dengan masyarakat sekitar. Perpustakaan bersama-sama masyarakat membangun model layanan perpustakaan baru yang disebut layanan perpustakaan berbasis masyarakat. Setiap proses layanan perpustakaan yang diberikan mencakup penilaian masyarakat, identifikasi kebutuhan, perencanaan layanan, penyempaian layanan, dan evaluasi dilakukan bersama-sama dengan masyarakat setempat. Berikut ini tabel layanan perpustakaan berbasis masyarakat.

Identifikasi Kebutuhan dan Penilaian Masyarakat		Perencanaan dan Penyampaian Layanan		Evaluasi
Penilaian Masyarakat	Identifikasi Kebutuhan	Perencanaan Layanan	Penyampaian Layanan	Anggota masyarakat bersama pustakawan mendiskusikan:
Menghabiskan waktu bersama masyarakat untuk menjalin hubungan dengan anggota masyarakat.	Berdiskusi bersama anggota masyarakat mengenai apa yang menjadi prioritas mereka.	Ide layanan merupakan ide masyarakat	Anggota masyarakat bersama-sama dengan pustakawan bekerja bersama memberikan layanan.	bagaimana seluruh proses layanan ini berlangsung
Mendengarkan dari masyarakat mengenai segala sesuatu yang penting bagi mereka.		Mengikutsertakan Masyarakat dalam perencanaan layanan.	Masyarakat menjadi partner dalam menyeleksi koleksi perpustakaan.	Apakah layanan dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan
		Pustakawan berperan sebagai rekan dan fasilitator, bukan sebagai pengajar.	Masyarakat bekerja secara kolaboratif dengan perpustakaan untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan perpustakaan.	Kegiatan apa yang harus dilakukan secara berbeda

Tabel Layanan Perpustakaan Berbasis Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diterapkannya layanan perpustakaan berbasis masyarakat melalui peningkatan inklusifitas semakin meningkatkan relevansi layanan yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat merasakan manfaat dan peran perpustakaan di tengah mereka, masyarakat juga merasa bertanggungjawab untuk turut

mengembangkan perpustakaan bersama pustakawan.

Jika penelitian tersebut di atas mengambil *setting* di Kanada, Penelitian yang dilakukan oleh Amrullah (2011) mengambil *setting* di Indonesia. Telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa berdirinya Perpustakaan Desa Taruna Bhakti Banjar waru berdiri atas inisiatif masyarakat Dukuh Banjar waru. Sehingga masyarakat merasakan manfaat

dan peran perpustakaan di tengah mereka, masyarakat juga merasa bertanggung jawab untuk turut membangun dan mengembangkan perpustakaan tersebut.

Profesi yang cukup dominan di Dukuh Banjar waru adalah petani. Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Perpustakaan Desa Taruna Bhakti Banjarwaru, perpustakaan beserta pengelolanya yang beranggotakan seluruh lapisan masyarakat dukuh Banjar waru mampu mendefinisikan kebutuhan informasi masyarakat penggunanya. Kemampuan tersebut tidak lepas dari peran pengelola perpustakaan untuk menghabiskan waktu bersama masyarakat dalam rangka membangun komunikasi dan hubungan sosial yang positif. Perihal tersebut didukung dengan kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia yang pada umumnya masih menjunjung tinggi harmonisasi hubungan sosial antar warga masyarakat setempat. Dalam usaha pembangunan hubungan yang positif tersebut mereka saling berdiskusi tentang permasalahan apa yang sebenarnya menjadi titik prioritas dalam menjalani kehidupan mereka.

Melalui komunikasi dan hubungan sosial yang baik tersebut, berhasil mencetuskan ide dan gagasan

tentang layanan-layanan yang akan diberikan oleh Perpustakaan Desa Taruna Bhakti Banjar waru kepada masyarakat setempat. Layanan perpustakaan juga tidak serta merta hanya diberikan atau dilayankan oleh pengelola perpustakaan saja, namun seluruh lapisan anggota masyarakat Dukuh Banjar waru turut aktif dan mensukseskan berbagai kegiatan dan layanan yang diberikan oleh Perpustakaan Desa Taruna Bhakti Banjar waru kepada mereka.

Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Perpustakaan Desa Taruna Bhakti Banjar waru, perpustakaan mampu memberdayakan masyarakat Dukuh Banjar waru, sehingga masyarakat Dukuh Banjar waru mampu meningkatkan mutu dan kualitas hidupnya. Berikut ini beberapa contoh kegiatan dan layanan yang diberikan oleh Perpustakaan Desa Taruna Bhakti Banjar waru dalam rangka memberdayakan masyarakat Dukuh Banjarwaru:

- a. Pelatihan Kewirausahaan: yaitu kegiatan yang diperuntukan bagi warga yang ingin mengetahui seluk beluk dunia usaha.
- b. Pelatihan Inseminasi Buatan: kegiatan ini berkerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi

-
- Pertanian Jawa Tengah yang memberikan bantuan berupa program Farmers Managed Extension Activities (FMA).
- c. Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik: kegiatan ini berkerjasama dengan Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Batang untuk memberikana pelatihan.
- d. Pelatihan Pembuatan Slondok: potensi tanaman singkong yang belum dimanfaatkan secara maksimal mengusung ide untuk mengadakan pelatihan ini.
- e. Pelatihan Penetasan Telur: kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan inseminasi buatan namun dalam kegiatan ini masyarakat mengundang pakar dari Kabupaten Kendal.

SIMPULAN

Perpustakaan sebagai institusi sosial seharusnya memiliki modal sosial sebagai perekat hubungan dengan masyarakat pengguna. Kemampuan perpustakaan menjalin interaksi sosial dengan masyarakat pengguna merupakan modal yang harus dimiliki agar perpustakaan tetap langgeng. Langgeng tidaknya sebuah perpustakaan Nampak pada kesadaran masyarakat untuk mendayagunakan perpustakaan sebagai wahana pengembang dan penambah wawasan serta informasi untuk mengembangkan kualitas hidupnya. Pada akhirnya interaksi antara perpustakaan dan masyarakat pengguna menumbuhkan simbiosis mutualisme, perpustakaan tetap langgeng dan masyarakat diberdayakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M. Isa Thoriq. 2011. Pemanfaatan Perpustakaan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Dukuh Banjar waru Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. *Skripsi: Tidak Diterbitkan*
- Blasius, Sudarsono. 2006. *Antologi Kepustakawanan Indonesia*. Jakarta: Ikatan Pustakawan Indonesia
- Gidley, J. M., Hampson, G. P., Wheeler, L, Bereded-Samuel, E. 2010. Social Inclusion: Context, Theory and Practice. *The Australasian Journal of University_Community Engagement, vol.5, no. 1.*
- Kenneth Williment. 2009. It takes a Community to Create a Library. *the Canadian Journal of Library and Information Practice and Research, vol. 4, no. 1.*
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No 3 Tahun 2001 Tentang Perpustakaan Desa/ Kelurahan
- Perpustakaan Nasional. 2000. Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/ Ed. Soekarman K. Jakarta: Perpustakaan Nasional
- Sutarno, NS. 2008. *Membina Perpustakaan Desa*. Jakarta: Sagung Seto